

Sihir Inovasi dan Ancaman Literasi

Perkembangan teknologi yang didorong oleh situasi pandemi membuat segala hal bisa dilakukan dari rumah dan membantu mendorong roda ekonomi. Namun pemahaman masyarakat terhadap layanan baru yang minim menjadi ancaman tersendiri.

Oleh Tim Riset

Pandemi Covid-19 memberikan dorongan yang luar biasa bagi perkembangan sektor teknologi informasi. Pembatasan mobilitas, mendorong masyarakat untuk mengakses kebutuhan mereka melalui *platform* digital mulai dari berbelanja, membeli makanan, berobat hingga hiburan.

Pada saat yang bersamaan infrastruktur digital di Indonesia masih bisa mengadopsi perkembangan hal tersebut sehingga *shortage* infrastruktur digital bisa diperkecil. Alhasil pertumbuhan sektor teknologi informasi mencatatkan angka positif dan tinggi dengan tidak dibarengi inflasi tinggi di sektor teknologi informasi. Sejalan dengan itu, inovasi keuangan digital Indonesia berkembang pesat. Selain pandemi, infrastruktur, market yang menjanjikan menjadi salah satu faktor pendorongnya.

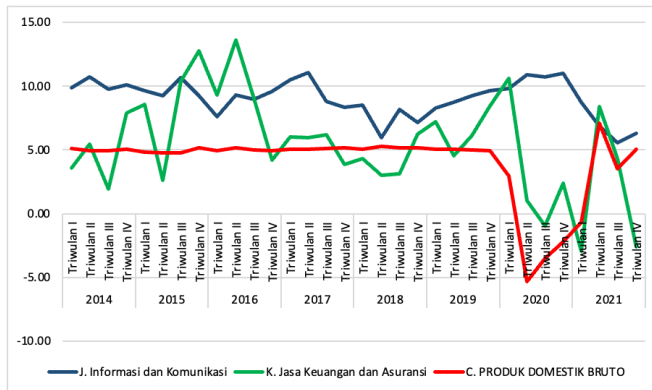
Namun demikian, perkembangan cuan yang menjanjikan dari sektor teknologi informasi serta pesatnya penetrasi digital/internet tidak dibarengi dengan ketercukupan literasi digital. Hal ini membawa dampak buruk bagi konsumen atau masyarakat Indonesia yang tergiur dengan beragam *platform* digital yang juga berkembang pesat selama masa pandemi.

Cuan Digital

Selama pandemi sektor teknologi informasi tumbuh positif, bahkan angka pertumbuhannya menyamai angka pertumbuhan di saat non pandemi. Selama pandemi, pertumbuhan sektor teknologi informasi (triwulanan) berkisar antara 5,54 persen (kuartal 3 2021) hingga 10,99 persen (kuartal 4 2020). Angka pertumbuhan ini hampir menyamai pertumbuhan tertinggi sektor ini di kala normal yang mencapai angka 11,04 di triwulan 2 2017.

Kondisi berbeda terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi dimana jasa keuangan dan asuransi. Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kinerja pertumbuhan yang ketat dengan sektor informasi dan keuangan dalam hal keuangan digital. Pertumbuhan ekonomi selama covid-19 mengalami kontraksi. Kontraksi terparah terjadi pada kuartal kedua 2020 sebesar 5,32 persen *year on year*. Sedangkan sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami kontraksi pada kuartal ketiga 2020, kuartal pertama 2021 dan kuartal keempat 2021. Persistensi sektor teknologi informasi sekali lagi menunjukkan bahwa sektor ini selama pandemi menunjukkan keperkasaannya.

Gambar 1. Pertumbuhan Sektor Teknologi Informasi, Jasa Keuangan dan Asuransi dan PDB Indonesia 2014-2021 (Triwulanan, Persen)

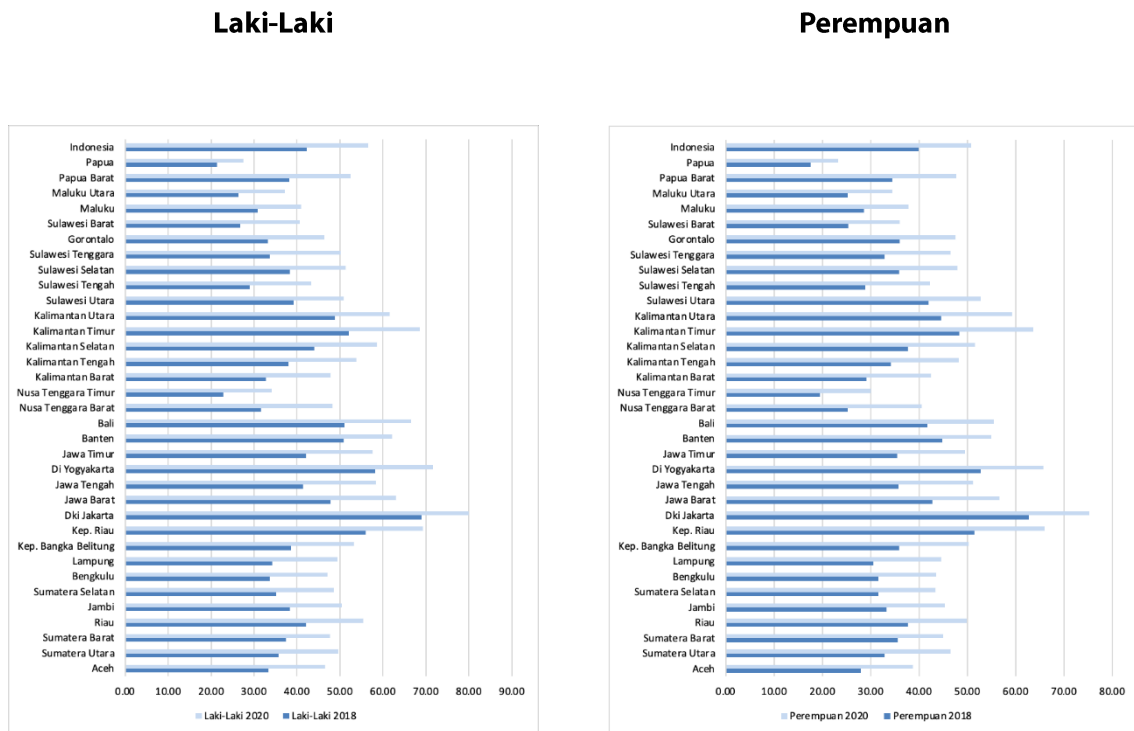


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan sektor teknologi informasi yang konsisten tinggi dibarengi dengan meningkatnya akses internet penduduk Indonesia. Pada tahun 2018, laki-laki usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebesar 42,31 persen sedangkan perempuan sebesar 39,90 persen. Pada tahun 2020, angkanya naik menjadi 56,65 persen untuk penduduk laki-laki dan 50,78 untuk penduduk perempuan. Kenaikan yang besar ini sekali lagi menunjukkan penetrasi internet yang cepat di Indonesia.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas terbanyak yang mengakses internet. Pada tahun 2020, penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebanyak 80 persen. Sedangkan pada kelompok perempuan berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebanyak 75 persen. Di sisi lain, provinsi dengan penetrasi internet terkecil adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi Papua.

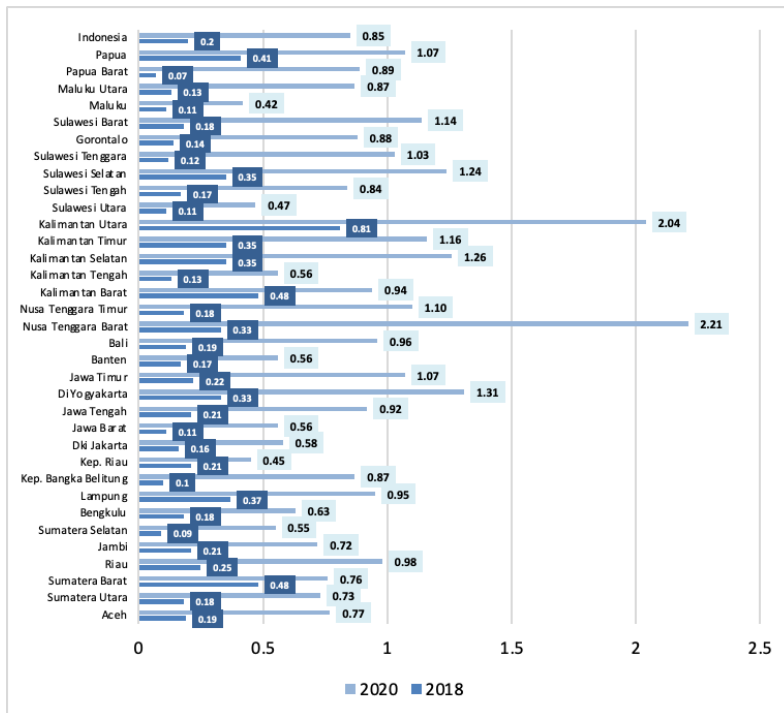
Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke atas yang Pernah Mengakses Internet Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lebih lanjut, pertumbuhan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi atau kemampuan membaca penduduk Indonesia. Hal ini terlihat dari data penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan kemampuan membaca. Pada 2018, hanya 0,2 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan mengakses internet. Memasuki tahun 2020, persentase penduduk yang tidak bisa membaca dan bisa mengakses internet naik menjadi 0,85 persen. Provinsi dengan porsi tertinggi penduduk yang tidak bisa membaca namun bisa mengakses internet adalah provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada provinsi ini, terdapat 2,21 persen penduduk tidak bisa membaca namun bisa mengakses internet.

Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dan Ketidakmampuan Membaca menurut Provinsi (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Inovasi Keuangan Digital

Perkembangan teknologi informasi, di tengah segala kekurangannya, memunculkan inovasi keuangan digital. Infrastruktur internet yang makin baik, penetrasi internet ke masyarakat yang semakin dalam, dibarengi aktivitas ekonomi yang tidak berhenti, memunculkan inovasi-inovasi keuangan digital. Namun demikian, inovasi keuangan digital harus dibarengi dengan literasi digital yang memadai agar masyarakat tidak dirugikan.

Mengacu pada pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inovasi Keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Hal ini seperti diatur dalam POJK No.13 /POJK.02/2018.

Di luar definisi inovasi keuangan digital tersebut di atas, terdapat kriteria inovasi keuangan digital yakni bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta perlindungan data.

Berdasarkan data OJK, perkembangan inovasi ekonomi digital per Januari 2022, telah terdapat 83 permohonan Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat. Lebih lanjut, Inovasi Keuangan Digital ini terdiri dari 15 klaster yang mencakup klaster aggregator, financial planner, E-KYC, Innovative Credit Scoring, InsurTech, Online Distress Solution, RegTech, Insurance Hub, Financing Agent, Property Investment Management, Project Financing, Funding Agent, Transaction Authentication, Tax and Accountng dan RegTech-TTD elektronik.

Gambar 3. Kluster Inovasi Keuangan Digital Tercatat OJK Per Januari 2022



Sumber : OJK

Apabila ditelisik lebih lanjut, kelimabelas kluster tersebut telah bersinggungan dengan hampir semua sendi kehidupan masyarakat mulai dari yang sifatnya *business to business* hingga *business to personal*. Beberapa IDK yang masuk ke ranah pribadi seseorang secara langsung antara lain adalah TTD elektronik dan *financial planner*. Lebih lanjut, dampak pengembangan inovasi keuangan digital di Indonesia bisa berkontribusi positif bagi perekonomian.

Sisi positif yang bisa dipetik adalah inovasi keuangan digital bisa mendorong inklusi keuangan yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peningkatan inklusi keuangan maka pemupukan modal ke dalam sistem perekonomian yang terintegrasi dengan sistem keuangan bisa berjalan dengan baik. Alhasil, pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih optimal. Seperti diketahui, salah satu determinan pertumbuhan ekonomi adalah modal atau modal.

Selain pemupukan modal, perkembangan inovasi keuangan digital bisa mempercepat perputaran uang (*velocity of money*) yang pada akhirnya bisa mempercepat perputaran roda perekonomian. Contohnya adalah bagaimana *platform IKD* bisa menjadi pasar ide dan gagasan mengenai proyek-proyek yang tersebar di seluruh Indonesia yang dimana sebelum ada IKD, informasi mengenai peluang proyek tersebut tidak ada atau terbatas. Namun pasca adanya informasi mengenai peluang pembiayaan melalui platform IKD, maka peluang pendanaan proyek tersebut semakin terbuka.

Ada sisi positif, ada sisi negatif. Bagitupun dengan perkembangan IKD. Sisi negatif ini muncul disebabkan dua hal utama pertama literasi keuangan dan digital masyarakat yang masih rendah dan regulasi. Terkait dengan literasi keuangan dan digital, data pada pendahuluan tulisan ini menjadi pertanda bahwa sinyal penguatan literasi digital dan keuangan masih menyisakan PR besar.

Kasus *binary trading* yang saat ini menggemparkan ranah media sosial Indonesia menjadi sisi kelam perkembangan inovasi keuangan digital yang tidak dibarengi dengan literasi keuangan dan digital yang mencukupi di masyarakat. Sejak awal, seharusnya sudah bisa dideteksi *symptom* inovasi keuangan digital yang berpotensi *fraud*. Salah satu *symptom* nya adalah return dari investasi *binary option* atau *robot trading* yang melebihi standar return pengembalian saham.

Selain itu, kasus jerat pinjaman *online illegal* juga menjadi salah satu eksek negatif dari berkembangnya inovasi keuangan digital. Sekali lagi literasi keuangan yang masih rendah menjadi pemicu banyak kasus jeratan pinjaman online. Ketiadaan informasi yang tersebar luas hingga pelosok terkait list pinjaman online legal, membuka peluang masyarakat untuk terjebak dalam jeratan pinjaman ilegal.

Berkaca dari kasus *robot trading* dan jerat pinjaman *online*, maka sangat urgen peningkatan kolaborasi otoritas, masyarakat dan industri keuangan dalam meminimalkan eksek negatif inovasi keuangan digital. Otoritas harus memastikan regulasi ataupun list daftar IKD ilegal tersebar luas ke masyarakat. Selain itu, edukasi mengenai seluk beluk dunia keuangan tidak bisa ditinggalkan.

Program edukasi bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan dalam menyusun kurikulum edukasi keuangan. Kurikulum bisa dibuat berjenjang mulai dari Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi. Lebih lanjut, agar daya gedor akan lebih kuat dengan pelibatan pelaku usaha. Kemudian, peran serta masyarakat adalah ikut berpartisipasi dalam mendeteksi IKD ilegal untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas. Peran ini penting mengingat keterbatasan sumber daya otoritas dalam melakukan deteksi dini IKD ilegal dan pengawasannya.